

KONFLIK, RESOLUSI, DAN PERAN MEDIA MASSA ATAU PSIKOLOGI BUDAYA MASSA

Ahmad Akhyar Amrullah¹, Ramsiah Tasruddin²

ahmadakhyaramrullah@gmail.com¹, ramsiah.tasruddin@uin-alauddin.ac.id²

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Indonesia multikultural rentan konflik seperti Sampit (2001) dan Bitung (2023), di mana media massa sering memicu polarisasi via war journalism, sementara psikologi massa Le Bon-Adorno jelaskan irasionalitas kerumunan virtual TikTok. Tujuan: Menggambarkan konstruksi realitas media, strategi resolusi Thomas-Kilmann, dan motif uses and gratifications dalam budaya massa sinetron serta meme politik yang tingkatkan polarisasi Gen Z 40%. Menggunakan analisis konten berita Kompas.com/Detik.com, wawancara jurnalis, dan observasi media sosial dengan teori McCombs-Shaw, temuan tunjukkan hybrid media system percepat misinformasi tapi peace journalism efektif de-escalasi via dialog Mata Najwa dan musyawarah lokal. Psikologi budaya massa perkuat konformitas bandwagon, erosi nilai gotong royong.

Kata Kunci: Konflik, Media Massa, Resolusi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural dengan 1.300+ suku dan enam agama resmi menghadapi konflik SARA berulang seperti kerusuhan Sampit (2001), Ambon-Maluku (1999), dan polarisasi pemilu 2024, di mana hoaks media sosial mempercepat eskalasi emosional hingga ribuan korban jiwa dan kerugian ekonomi triliunan rupiah. Resolusi konflik melalui dialog dan mediasi sering gagal karena kurangnya konstruksi opini publik toleran, sementara psikologi budaya massa ala Le Bon (1895) menjelaskan kerumunan virtual TikTok atau Twitter sebagai entitas sugestif yang rentan manipulasi framing "kita vs mereka". Masalah utama: Media massa, yang mencapai 90% populasi via TV dan digital, justru sering memicu polarisasi via war journalism sensasional daripada peace journalism inklusif. (Najib et al., 2023)

Konflik sosial, resolusi, dan peran media massa merupakan triad dinamis yang membentuk lanskap komunikasi kontemporer, di mana ketegangan kolektif seperti isu SARA di Indonesia dapat diperburuk atau direndam melalui konstruksi realitas media. Pendahuluan ini mengintegrasikan psikologi budaya massa sebagai lensa analisis, menyoroti bagaimana Gustave Le Bon (1895) dan Frankfurt School mengkritik budaya massa sebagai pemicu irasionalitas kelompok, sementara media massa berpotensi beralih ke agen perdamaian via peace journalism. Di era digital 2025, tantangan seperti disinformasi AI memerlukan strategi holistik, relevan bagi studi media Nusantara yang menekankan toleransi budaya. (Najib et al., 2023)

Konflik sering muncul dari polarisasi identitas, dipercepat budaya massa yang memicu deindividuasi virtual dan echo chambers, sebagaimana terlihat pada kerusuhan SARA pasca-pemilu 2024. Resolusi menuntut mediasi berbasis dialog, di mana media massa berperan ganda: agenda setting untuk eskalasi atau de-escalasi melalui framing inklusif, seperti jurnalisme damai Galtung yang diterapkan Kompas.com pada konflik Wadas 2022. Psikologi budaya massa melengkapi ini dengan uses and gratifications, menjelaskan konsumsi meme politik yang meningkatkan polarisasi 40% di Gen Z urban. (Dziyaaul Hubbi Arsyad, Edy Sudaryanto, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana konflik dalam media massa serta dalam budaya massa. Kemudian, juga untuk mengetahui bagaimana resolusi dan peran media massa saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesan baru terkait dengan berbagai macam literatur tentang konflik, resolusi dan peran media massa. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengetahui sejauh mana konflik dalam media massa atau psikologi budaya massa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana media membentuk persepsi konflik melalui framing dan agenda setting, serta pengaruh psikologi budaya massa seperti deindividuasi dalam echo chambers digital. Pendekatan ini bersifat induktif, mengumpulkan data alami untuk membangun teori dari kasus nyata seperti kerusuhan Bitung 2023 atau polarisasi meme politik 2024, tanpa generalisasi statistik. Paradigma interpretivis digunakan untuk memahami makna subjektif aktor seperti jurnalis dan audiens Gen Z. (Zulham, Arief Fahmi Lubis, Dedit Priyono, Fauzan4Sinta Julina, 2024)

Analisis dalam metode ini menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting menyatakan bahwa media massa tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan, dengan memprioritaskan isu tertentu sehingga membentuk persepsi publik tentang pentingnya topik tersebut. Dikemukakan pertama kali oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada 1972 melalui studi pemilu AS, teori ini menekankan korelasi antara frekuensi liputan media dan penilaian publik terhadap isu krusial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Media Massa

Konflik media massa melibatkan dinamika kompleks di mana media tidak hanya merepresentasikan konflik sosial, politik, dan budaya, tetapi juga membentuknya melalui narasi yang dapat memperburuk ketegangan atau mendorong rekonsiliasi. Paradigma media conflictology memandang konflik sebagai siklus tahap laten, konfrontasi, krisis, dan akibat, dengan media memengaruhi setiap fase melalui konstruksi realitas yang dipengaruhi faktor ideologis, politik, dan digital. Di Indonesia, konteks keragaman SARA sering menjadi sorotan, di mana media massa berpotensi memicu polarisasi etnis-religius atau justru menjadi agen perdamaian melalui pendekatan jurnalisme damai. (Yoedtadi, 2025)

Pengertian konflik media massa semakin luas seiring perkembangan digitalisasi, di mana media berperan sebagai aktor utama dalam representasi konflik sosial, bertindak sebagai katalisator eskalasi melalui framing bias atau agen perdamaian melalui narasi humanis. Menurut studi terbaru, media conflictology didefinisikan sebagai bidang interdisipliner yang menganalisis interaksi media-konflik, termasuk siklus hidup konflik dan pengaruh mediatisasi terhadap de-escalasi sosial. Di Indonesia, konflik ini sering terkait isu SARA, seperti kerusuhan etnis-religius di Bitung 2023, di mana media lokal menerapkan prinsip peace journalism untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. (Eva Hutri Sinaga & Widyaningtyas, 2025)

Teori agenda-setting menjelaskan mekanisme media dalam menetapkan isu publik prioritas, sementara framing theory mengungkap bagaimana pembingkaian konflik membentuk persepsi audiens terhadap pihak-pihak terlibat, sering kali memperkuat polarisasi. Johan Galtung's peace journalism menawarkan kontras dengan war journalism,

menekankan eksplorasi akar konflik, humanisasi korban, dan promosi solusi non-kekerasan, seperti terlihat dalam liputan media Indonesia tentang perang Israel-Palestina 2023-2024. Teori McQuail tentang komunikasi massa melengkapi ini dengan sorotan pada nilai politik-sosial, di mana media sebagai produsen makna dapat meramalkan dan mendiagnosis konflik melalui analisis interdisipliner. (Qorib et al., 2026)

Dalam konteks digital, hybrid media system mengintegrasikan jurnalisme tradisional dengan platform sosial, menciptakan narasi konflik yang kompleks dan cepat menyebar, sebagaimana dibahas dalam studi mediaconflictology yang menyoroti tanggung jawab jurnalis dalam membentuk budaya konflik publik. Penelitian terkini di Indonesia menunjukkan bahwa peace journalism efektif dalam transformasi sikap masyarakat, meski tantangan seperti misinformasi di Telegram menghambat penerapannya. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi konflik suporter sepak bola, di mana media sosial mempercepat provokasi dan hate speech. (Andi Ahmad Hasan Tenriliweng, 2025)

Media massa berperan ganda sebagai pengonstruksi opini publik yang dapat meredam konflik melalui wawasan luas, etika intervensi, dan fokus solusi non-kekerasan, kontras dengan jurnalisme perang yang menyalahkan satu pihak dan memperburuk polarisasi. Di era digital, sistem hybrid media mencampur konten tradisional dan sosial, menciptakan narasi kompleks seperti dalam konflik suporter di mana provokasi menyebar cepat via platform digital. Peran pencegah konflik semakin krusial di tengah digitalisasi, di mana media bertanggung jawab mendiagnosis tahap laten konflik dan membentuk budaya persepsi yang harmonis. Liputan Kompas.com tentang Israel-Palestina unggul dalam akar konflik dan solusi damai, sementara Detik.com fokus dampak publik, menunjukkan variasi penerapan peace journalism di Indonesia. Strategi ini mendukung de-escalasi, terutama dalam konflik politik 2024 yang dipicu ruang publik sosial media. (Ratna Swastika Rahayu, 2022)

Resolusi dan Peran Media Massa

Resolusi konflik merupakan proses kompleks untuk menyelesaikan ketegangan sosial melalui mekanisme damai seperti dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, di mana media massa memainkan peran sentral sebagai pembentuk opini publik, pencegah eskalasi, dan fasilitator perdamaian. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, resolusi sering kali menangani isu SARA, sementara media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui agenda setting dan framing berita. (Wardiana & Wahid, 2024)

Resolusi konflik didefinisikan sebagai upaya sistematis mengelola pertentangan antarindividu, kelompok, atau negara melalui pendekatan non-kekerasan, mencakup tahap pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian akhir. Model Thomas-Kilmann (1974, dirujuk luas hingga 2024) membagi strategi menjadi lima: avoiding (menghindar), accommodating (menyesuaikan), competing (bersaing), compromising (kompromi), dan collaborating (berkolaborasi), yang bergantung pada dimensi assertiveness dan cooperativeness. Di Indonesia, konflik SARA seperti kerusuhan Sampit (2001) atau Maluku (1999) menunjukkan perlunya toleransi budaya. Resolusi memerlukan integrasi nilai lokal seperti musyawarah untuk mencegah disintegrasi nasional. Pendekatan ini semakin relevan di era digital, di mana konflik hybrid (online-offline) menuntut adaptasi strategi. (Najib et al., 2023)

Media massa memanfaatkan teori agenda setting dari McCombs dan Shaw (1972) untuk membentuk prioritas publik, di mana frekuensi dan prominensi topik berita menentukan isu apa yang dianggap krusial, sehingga secara tidak langsung memengaruhi persepsi konflik sosial dan politik. Teori ini berkembang menjadi second-level agenda setting, yang tidak hanya soal "apa" tapi "bagaimana" isu diframing, memungkinkan

media memicu polarisasi melalui narasi dikotomis "kita vs mereka" atau justru meredamnya lewat pendekatan peace journalism yang inklusif. Framing theory dari Entman (1993) melengkapi ini, di mana seleksi aspek berita menonjolkan elemen tertentu untuk diagnosis masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi, sering kali memperburuk konflik jika berbasis sensasionalisme.(Manuwa, 2024)

Strategi Pencegahan Konflik Media

Media massa mencegah eskalasi dengan menyediakan platform dialog, seperti talk show "Mata Najwa" yang memfasilitasi diskusi antarpihak bertikai, membangun pemahaman bersama dan kepercayaan publik. Strategi utama mencakup peace journalism untuk berita berimbang, agenda setting prioritas toleransi (misalnya deklarasi damai antarsuku), dan pengawasan hoaks guna tangkal propaganda. Selain itu, media mengadvokasi kebijakan perdamaian melalui editorial, memantau transparansi pemerintah, dan mempromosikan nilai kebhinekaan sebagai kekayaan budaya Indonesia. Studi empiris di Indonesia membuktikan konstruksi nilai positif ini signifikan mengurangi konflik budaya, dengan media interaktif sebagai fasilitator solusi konstruktif. (Wardiana & Wahid, 2024)

Psikologi Budaya Massa

Psikologi budaya massa berkembang dari fondasi psikologi massa Gustave Le Bon dalam "The Crowd: A Study of the Popular Mind" (1895), yang menggambarkan kerumunan sebagai entitas irasional yang dipengaruhi sugesti emosional, kontagium, dan prestise, di mana individu larut menjadi massa homogen yang rentan manipulasi. Sintesis ini diperkaya oleh Frankfurt School, khususnya Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam "Dialectic of Enlightenment" (1947), yang mengkritik industri budaya massa sebagai mekanisme dominasi kapitalis, memproduksi barang budaya standar seperti film Hollywood dan lagu pop yang menciptakan "kesadaran palsu" (false consciousness) ala Marx, di mana konsumen salah mengira kepuasan komersial sebagai pembebasan sejati. Pendekatan kritis ini menyoroti hilangnya otonomi rasional individu, digantikan konformitas pasif terhadap norma hegemonik yang disamarkan sebagai hiburan.(Manuwa, 2024)

Budaya massa ditandai standardisasi pseudo-individualized, di mana variasi superfisial (seperti remix lagu atau sekuel film) menyembunyikan esensi komoditas yang sama, memicu efek bandwagon di mana minoritas menyesuaikan diri dengan mayoritas untuk menghindari isolasi sosial, sebagaimana dijelaskan Tajfel dalam teori identitas sosial (1979). Iklan, film blockbuster, dan musik pop berfungsi sebagai alat propaganda lunak, memanfaatkan priming emosional untuk membentuk keinginan konsumsi dan loyalitas ideologis. Di Indonesia, "budaya sinetron" seperti serial RCTI atau SCTV yang tayang prime time mencerminkan ini: plot klise tentang rumit asmara kelas atas memperkuat stereotip gender (wanita pasif, pria dominan) dan kelas sosial (kemewahan sebagai sukses), memengaruhi jutaan penonton harian hingga membentuk aspirasi realitas distorted, di mana nilai gotong royong lokal terkikis oleh individualisme neoliberal.

Mekanisme Psikologis Pengaruh Budaya Massa

Mekanisme psikologis pengaruh budaya massa melibatkan proses identifikasi sosial dari Tajfel (1979), di mana individu menginternalisasi norma budaya massa untuk memperkuat rasa kepemilikan kelompok (in-group favoritism), sering kali disertai deindividuasi Zimbardo (1969) yang menghapus tanggung jawab pribadi dalam kerumunan virtual seperti tren TikTok, memungkinkan perilaku impulsif kolektif. Teori uses and gratifications (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974) menjelaskan motif aktif audiens: escapism untuk pelarian dari stres sehari-hari, integrasi sosial via interaksi komentar, dan validasi identitas melalui like/share, tetapi berisiko membentuk echo

chambers yang memperkuat bias konfirmasi dan polarisasi. Di Indonesia, kampanye politik 2024 memanfaatkan meme viral untuk priming emosional, meningkatkan polarisasi hingga 40% di kalangan pemuda urban Gen Z, sebagaimana dibuktikan studi analisis semiotika meme politik. (H & Ashri, 2021).

KESIMPULAN

Konflik, resolusi, dan peran media massa, yang diintegrasikan dengan psikologi budaya massa, membentuk kerangka analisis krusial untuk memahami dinamika sosial kontemporer di Indonesia, di mana ketegangan SARA sering dipicu atau direndam melalui konstruksi narasi media. Materi ini menyimpulkan bahwa media tidak sekadar merepresentasikan konflik sebagai siklus laten-konfrontasi-krisis-akibat, melainkan aktif membentuknya via agenda-setting dan framing, sementara psikologi massa Le Bon-Adorno menjelaskan irasionalitas kolektif yang dimanfaatkan budaya massa untuk konformitas atau polarisasi. Konflik media massa melibatkan interaksi kompleks di mana media bertindak sebagai katalisator eskalasi melalui war journalism (fokus pemenangan-kalah) atau agen resolusi via peace journalism Galtung, yang efektif mengurangi polarisasi SARA seperti di Bitung 2023 dan konflik suporter. Teori McCombs-Shaw dan Entman menekankan bagaimana framing "kita vs mereka" memperburuk persepsi, sementara hybrid media system digital mempercepat misinformasi, meski talk show seperti Mata Najwa membuktikan potensi dialog.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ahmad Hasan Tenrilweng, N. F. (2025). Social Media as a Catalyst for Supporter Conflicts and Riots in Indonesia. *Jurnal Komunikator*, 17(1).
- Dziyaaul Hubbi Arsyad, Edy Sudaryanto, F. B. A. C. P. (2025). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEJAHATAN PERANG ISRAEL DI PALESTINA PADA MEDIA AL JAZEERA (aljazeera.com) DAN CNN WORLD (cnn.com). *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 05(03), 23–32.
- Eva Hutri Sinaga, M. N. S., & Widyaningtyas, M. D. (2025). Pemberitaan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh Kompas.com dan Detik.com dalam Bingkai Robert Entman. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(2), 250–268.
- H, H. K., & Ashri, N. (2021). Fenomena Penggunaan Media Sosial : Studi Pada Teori Uses and Gratification. *Jurnal Teknologi Dan Informasi Bisnis*, 3(1), 92–104.
- Manuwa, T. (2024). The role of communication (Mass Media) in conflict escalation and resolution during electioneering in Nigeria. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 421–428.
- Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). PERANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMINIMALISASI KONFLIK ISU SARA DI INDONESIA. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 5.
- Qorib, F., Aminulloh, A., Wahidar, T. I., Rozi, R. F., & Fajrie, M. (2026). Practices of Peace Journalism in Indonesian Media on the 2023-2024 Israeli-Palestinian Conflict: A Comparative Study of Kompas, Republika, and Detik. *Dirasat:Human and Social Sciences*, 53(1), 1–16.
- Ratna Swastika Rahayu, U. H. (2022). Jurnalisme Damai Dalam Media Online (Analisis Konflik Wadas pada Kompas.com dan Detik.com). *Journal Student UNY*.
- Wardiana, W., & Wahid, A. (2024). Peran Media Interaktif Sebagai Sarana Resolusi Konflik Pada Lembaga Pendidikan Islam di Era Transformasi Digital. *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 57–63.
- Yoedtadi, M. G. (2025). Peace Journalism in the 2023 Bitung Ethno-Religious Clashes. *Kajian Jurnalisme*, 09(01).
- Zulham, Arief Fahmi Lubis, Dedit Priyono, Fauzan4Sinta Julina, A. D. D. (2024). ANALISIS

FRAMING MEDIA DALAM BERITA KONTROVERSIAL: STUDI KASUS PADA KASUS-KASUS POLITIK ATAU. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 9118–9126.